

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PROSTITUSI SECARA ONLINE DALAM PRESPEKTIF
CYBERCRIME (Kajian Normatif Komparatif KUH Pidana, UU No 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 44
tahun 2008 Tentang Pornografi dan RUU KUH Pidana)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk memenuhi Sebagian Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Febrian Rizky Akbar

0910113118



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PROSTITUSI SECARA ONLINE DALAM PRESPEKTIF
CYBERCRIME (KAJIAN NORMATIF KOMPARATIF KUH
PIDANA, UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK, UU NO 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI DAN RUU KUHP)**

Febrian Rizky Akbar

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Email : vebrianrizky@rocketmail.com

ABSTRACT

As a human development, human needs are increasing rapidly, as well as the information and communication network. In the end science and technology development ensued. However, the development of science and technology will not only bring positive effects, but bring negative effects. When the negative developments are emerging. Negative developments can be seen from the emergence of a new crime (cybercrime) in the form of prostitution that can be done online, that prostitution can be done simply by accessing the Internet or a particular communication. Basically, before the development of the field of information and communication. Prostitution can only be done by direct contact, but now because of the development is now seeming to be facilitated prostitution and pampered with the development of these technologies. Now prostitution can be done by accessing certain sites or by using a specific communication network. Indonesia has four product legislation governing the activities of prostitution, they are KUHP, UU No 11 Year 2008 about Information and Electric Transaction , UU No 44 Year 2008 about Porn and RUU KUHP. However, whether criminal elements contained in the formulation or content of articles regulating prostitution can still be set, snare, and burdening the criminal responsibility of the perpetrators of these prostitutes online. In this part of the discussion will discuss the comparison between the four of laws or legislation such.

ABSTRAK

Berdasarkan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, begitu pula pada jaringan informasi dan komunikasi. Akan tetapi perkembangan IPTEK tersebut tidak hanya membawa efek positif saja, melainkan membawa efek negative. Ketika perkembangan negative mulai bermunculan. Perkembangan negatif tersebut dapat dilihat dari munculnya sebuah tindak pidana baru (*cybercrime*) yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara *online*, yakni kegiatan prostitusi yang dapat dilakukan hanya dengan mengakses jaringan internet atau komunikasi tertentu. Pada dasarnya sebelum terjadi perkembangan dibidang informasi dan komunikasi. Kegiatan prostitusi tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara kontak langsung, tetapi karena adanya perkembangan tersebut kini kegiatan prostitusi seakan menjadi dipermudah dan dimanjakan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kegiatan prostitusi dapat dilakukan dengan cara mengakses situs-situs tertentu atau dengan menggunakan jaringan komunikasi tertentu. Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana berupa prostitusi secara *online* yakni KUHP, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan RUU KUHP. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut masih perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atau tidak dalam hal menjerat pelaku tindak pidana prostitusi yang dilakukan dengan menggunakan media informasi atau dokumen elektronik sebagai media utamanya.

Kata Kunci : Tindak pidana, Prostitusi, *Online*, *Cybercrime*

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi ini berimplikasi pada perubahan sosial (*social change*) yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang mana mengemukakan bahwa dalam kehidupan manusia banyak unsur yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat

tetapi perubahan didalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.¹

Kini Negara yang teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat menjadi Negara yang maju apabila Negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Tetapi apa yang akan terjadi apabila sebuah Negara yang memiliki media ini tidak dapat memanfaatkan dan mengolahnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Maka perkembangan tersebut bak pisau bermata dua, perkembangan media interaksi berbasis *internet* juga memiliki sisi negative apabila Negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.² Sisi negatif dari perkembangan ini adalah munculnya *cybercrime* atau kejahatan komputer yang berdampak pula pada hukum nasional yang telah ada, sehingga dirasa diperlukannya penyesuaian hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan tersebut. Di Indonesia, tingkat penyalahgunaan jaringan internet juga tinggi hal ini dapat dilihat dari peneberitaan surat kabar Kompas yang berjudul *Cyber Media* Pada tanggal 19/3/2002 menulis bahwa berdasarkan AC Nielsen 2001 Indonesia ternyata menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka merasa perlu dilakukan sebuah pembahasan yang membahas mengenai cara pengaturan serta penanggulangan kejahatan Prostitusi secara *online* dalam *cyberspace* yang telah meresahkan banyak kalangan beserta sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh KUH Pidana, RUU KUH Pidana, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara lebih mendalam. Dalam hal dasar hukum yang memiliki kaitan erat pada pokok permasalahan ini adalah KUHP pasal 296 dan pasal 506 KUHP, UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat

¹ Dewi Bunga , 2012, *Prostitusi Cyber*, Udayana University Press, Denpasar, hal 16

² *Ibid.*, hal 1

(1), RUU KUHP pasal 469, UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi Pasal 30 juncto Pasal 4 Ayat (1).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai prostitusi secara *online*, yang mengkaji mengenai kejahatan prostitusi secara *online* lebih mendalam, dengan menggunakan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana prostitusi secara *online*. Supaya mendapatkan sebuah kejelasan mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban tindak pidana prostitusi secara *online* ini.

2. Rumusan masalah

- a. Bagaimana pengaturan mengenai prostitusi secara *online* dalam ketentuan KUHP Pidana, UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, RUU KUHP sebagai kebijakan atau upaya penal dalam menanggulangi dan menyikapi perbuatan atau tindak pidana prostitusi secara *online*?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi secara *online* dalam ketentuan KUH Pidana, UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan RUU KUH Pidana ?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal mengkaji problematika adalah penelitian normative komparatif, yakni penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dengan problematika yang akan dibahas, serta membandingkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan dengan secara analitis induktif. Prosesnya bertolak belakang dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.³ Sedangkan pendekatan

³ Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; Sinar Grafika. Hal 24

yang digunakan dalam mengkaji gejala ini adalah pendekatan *Statue Approach* (pendekatan perundang-undangan), pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/deree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat kongkret dan khusus.⁴ Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah sebagai berikut Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 27 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 juncto Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah. Sedangkan untuk Teknik Memperoleh Bahan Hukum pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan *library research* (studi kepustakaan) dan akses *Internet*. Kemudian analisis Bahan Hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan interpretasi komparatif futuristis. Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan membandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan.⁵ Sedangkan interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum.⁶

III. Pembahasan

A. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Prespektif Cybercrime

Dalam hal pengaturan kegiatan prostitusi secara *online* terdapat beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan prostitusi secara *online* tersebut, antara lain adalah :

⁴ *Ibid.*, hal 97

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta ; Liberty, hal 174

⁶ *ibid*

1. KUHP Pasal 296 dan 506, pasal 296 adalah “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 506 KUH Pidana merumuskan sebagai berikut “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”
2. UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1), Isi pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3. UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 30 Juncto Pasal 4 Ayat (1), dirumuskan sebagai berikut “ Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”
4. RUU KUHP Pasal 469 Pasal 469 Ayat (1) ini merumuskan bahwa “Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena

pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

berikut adalah tabel mengenai pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi secara *online* berdasarkan perspektif *cybercrime* dari keempat Undang-undang tersebut.

Perbandingan Pengaturan Mengernai Prostitusi Secara *Online* Berdasarkan KUHP, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, RUU KUHP

No	Keterangan	KUHP	UU No 11/2008/ITE	UU No 44/2008/Pornografi	RUU KUHP
1	Pasal	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 269 dan 506 adalah Perbuatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. sebuah perbuatan yang memperlancar, memudahkan, perbuatan cabul orang lain 2. manarik keuntungan 3. menjadikannya sebagai kebiasaan dan mata pencaharian/sumber penghasilan. 4. Kata menjadikan kebiasaaan dan mata pencaharian disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus dilakukan lebih dari satu kali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 27 Ayat (1) mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. perbuatan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 2. sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik 3. Informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan 4. Dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 30 Juncto Pasal 4 UU No 44/2008/Pornografi lebih memperinci lagi mengenai pengaturan tindak pidana menjalankan prostitusi secara <i>online</i>, • bahkan UUP ini mengkategorikan prostitusi menjadi beberapa kategori jasa layanan seksual yakni : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin, 3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagai unsur obyektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 469 RUU KUHP lebih mengenai mengenai unsur objektif secara khusus lagi, di dalam muatan Pasal 469 RUU KUHP disebutkan pengaturan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk aktivitas seksual 2. Didalamnya juga disebutkan pula apa saja yang dapat menjadi objek dari aktivitas seksual 3. media-media yang dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas seksual. 4. media, objek, bentuk dari aktivitas seksual tersebut. 5. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

				tindak pidananya.	
2	Pengaturan mengenai unsur obyektif dan subyektif	<ul style="list-style-type: none"> Berupa : <ol style="list-style-type: none"> Perbuatan dengan sengaja Menjadikannya sebagai kebiasaan Menjadikannya sebagai mata pencaharian 	<ul style="list-style-type: none"> Berupa: <ol style="list-style-type: none"> Perbuatan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik yang mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan Dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> Berupa : <ol style="list-style-type: none"> Perbuatan menyediakan, menawarkan, mengiklankan, mengeksploitasi, memamerkan <i>aktivitas</i>, daya tarik tubuh tertentu, jasa layanan atau hubungan seksual Menggunakan media-media tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> Berupa : <ol style="list-style-type: none"> Larangan mengenai perbuatan eksploitasi, aktivitas dan hubungan seksual Objek dari aktivitas, eksploitasi dan hubungan seksual tersebut adalah orang lain yang lain jenis, sesama jenis maupun dengan binatang Dilakukan dengan menggunakan media-media tertentu,
3	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> 1 tahun 4 bulan; Pidana denda sejumlah lima belas ribu rupiah (Pasal 296); Kurungan selama 1 tahun (Pasal 506) 	<ol style="list-style-type: none"> Sanksi pidana penjara menjadi paling lama 6 tahun dan/atau Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) 	<ol style="list-style-type: none"> Pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banyak Rp 3.000.000.000, 	<ol style="list-style-type: none"> Sanksi pidana paling lama adalah 5 tahun dan Pidana denda paling banyak termasuk dalam kategori IV

Sumber : Bahan Hukum Primer, Diolah, 2013

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Prespektif

Untuk mengawali pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan.

Mengingat kembali bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUH Pidana sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).⁷

berikut adalah tabel mengenai pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana prostitusi secara *online* berdasarkan perspektif *cybercrime* dari keempat Undang-undang tersebut:

⁷ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung ; Mandar Maju, hal 96

Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi Secara *Online* KUHP, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, RUU KUHP

No	Keterangan	KUHP	UU No 11/2008/ITE	UU No 44/2008/Pornografi	RUU KUHP
1	Unsur Obyektif	<ul style="list-style-type: none"> Pada Pasal 296 dan 506 sebagai syarat supaya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana harus dipenuhinya perbuatan dengan mengandung unsur pidana sebagai berikut : 1. Pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat terdapat 2. adanya usaha memudahkan, memperlancar orang lain dalam 3. tujuan dari perbuatan memudahkan dan memperlancar adalah untuk perbuatan cabul. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku baru dapat dibebani pertanggungjawaban apabila pelaku telah melakukan dan telah tercapainya tujuan dari perbuatan yang berupa: 1. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 2. Sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik 3. informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik mengandung unsur pelanggaran kesusilaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 30 Juncto Pasal 4 Ayat (1) UU No 44/2008/Pornografi lebih memperinci lagi mengenai unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi, Supaya perbuatan seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana, berikut macam-macam unsur pidana yang terdapat pada sebuah perbuatan yang harus dipenuhi oleh pelaku : 1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin, 3. Mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 469 RUU KUHP lebih menjelaskan mengenai unsur tindak pidana yang harus terpenuhi sebagai syarat dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya secara lebih khusus lagi Dalam muatan Pasal 469 RUU KUHP disebutkan bentuk aktivitas seksual serta juga disebutkan : 1. Apa saja yang dapat menjadi objek dari aktivitas seksual 2. Media-media yang dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas seksual. 3. Macam aktivitas, objek dan media yang digunakan.

				maupun tidak langsung layanan seksual	
2	Unsur Subyektif	<ul style="list-style-type: none"> KUHP merumuskan bahwa yang menjadi kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi adalah : <ol style="list-style-type: none"> Kesalahan berupa dengan sengaja Menjadikannya sebagai mata pencaharian dan kebiasaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Sama halnya dengan rumusan kesalahan yang melekat pada muatan KUHP, UU ITE merumuskan kesalahan dari perbuatan menjalankan kegiatan prostitusi secara <i>online</i> hanya dirumuskan : <ol style="list-style-type: none"> Dengan adanya kesalahan Dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya Keadaan jiwa yang sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> Di dalam rumusan yang terdapat pada Pasal ini tidak disebutkan : <ol style="list-style-type: none"> unsur kesalahan berupa “menyediakan”. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat, normal dan tidak cacat. Kedua hal tersebut harus dapat dibuktikan, supaya pelaku dapat dibebani pertanggungjawaban pidana 	<ul style="list-style-type: none"> Berbeda hal dengan UU No 44/2008/Pornografi yang menyebutkan kata “menyediakan” sebagai unsur kesalahan dari tindak pidananya RUU KUHP memberikan unsur kesalahan yang sama dengan KUHP dan UU ITE, yakni dengan merumuskan unsur subyektif berupa : <ol style="list-style-type: none"> kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara sadar bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang mnengaturinya dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat dan tidak cacat

3	Sanksi	Pidana penjara : <ul style="list-style-type: none"> • 1 tahun 4 bulan Pidana denda : <ul style="list-style-type: none"> • sejumlah lima belas ribu rupiah (Pasal 296), kurungan selama 1 tahun (Pasal 506) 	Pidana penjara : <ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 6 tahun pidana denda : <ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) 	Pidana penjara : <ul style="list-style-type: none"> • Paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun • Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banyak Rp 3.000.000.000, 	Pidana Penjara : <ul style="list-style-type: none"> • Dirumuskan bahwa sanksi pidana paling lama adalah 5 tahun Pidana denda : <ul style="list-style-type: none"> • Paling banyak termasuk dalam kategori IV
---	--------	--	---	--	--

Sumber ; Bahan Hukum Primer, Diolah, 2013

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai prostitusi secara *online* dalam berbagai ketentuan adalah :
 - a. KUHP terdapat pada pasal 269 dan 506, namun demikian Pasal ini hanya mengatur mengenai tindak pidana secara umum saja;
 - b. UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE terdapat pada Pasal 27 Ayat (1), namun demikian isi dari ketentuan ini hanya mengatur mengenai kegiatan yang dilakukan oleh mucikari dalam kegiatan menjalankan prostitusi secara *online*;
 - c. UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat pada Pasal 30 Juncto Pasal 4 Ayat (1) pasal ini dapat digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana prostitusi secara *online* karena baik unsur obyektif atau subyektif telah terpenuhi dalam tindak pidana berupa prostitusi secara *online*;
 - d. RUU KUHP terdapat pada Pasal 469, namun demikian Pasal ini belum dapat digunakan sebagai dasar hukum walaupun sebenarnya unsur-unsur pidana didalamnya dapat menjerat pelaku, namun karena masih rancangan maka masih tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.
2. Pertanggungjawaban Pidana mengenai prostitusi secara *online* harus memenuhi berbagai unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a. KUHP terdapat pada pasal 269 dan 506, namun demikian dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana pasal ini dapat digunakan tapi masih kurang tepat karena terdapat beberapa unsur tindak pidana yang tidak diatur;
 - b. UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE terdapat pada Pasal 27 Ayat (1), namun demikian dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana pasal ini dapat digunakan tapi masih kurang tepat, karena unsur pidana yang menjadi syarat, masih ada yang belum terpenuhi;
 - c. UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat pada Pasal 30 Juncto Pasal 4 Ayat (1), pasal ini sudah dapat digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana karena unsur tindak pidana yang melekat pada tindak pidana prostitusi secara *online* telah diatur secara keseluruhan dalam ketentuan Pasal 30 Juncto Pasal 4 Ayat (1);

- d. RUU KUHP terdapat pada Pasal 469, pasal ini sudah dapat digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana karena unsur tindak pidana yang melekat pada tindak pidana prostitusi secara *online* telah diatur secara keseluruhan dalam ketentuan Pasal 469 RUU KUHP.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dengan adanya pembahasan mengenai perbandingan pertanggungjawaban pelaku dari tindak pidana prostitusi secara *online* ini diharapkan pemerintah segera merevisi beberapa Pasal yang telah disebutkan atau segera menyelesaikan RUU KUHP supaya RUU KUHP tersebut dapat menjadi hukum positif.
2. Bagi aparat penegak hukum, bahwa tindak pidana berupa prostitusi secara *online* ini perlu dicermati secara komprehensif kembali, mengingat sebenarnya tindak pidana prostitusi secara *online* ini sebenarnya dapat dikenai pasal berlapis berdasarkan perundang-undangan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aji Kresno, Siswanto Denny dan Wiratama Chandra, 2002, *Kejahatan Internet ; Tips Aplikasi dan Trik Penanggulangannya*, Jakarta ; Elex Media Komputindo.

Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bunga Dewi, 2012, *Prostitusi secara online: Diskursus Penegakkan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Denpasar-Bali ; Udayana University Press.

Chazawi Adami, 1995, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang ; IKIP Malang.

_____, 2009, *Tindak Pidana : Pornografi*, Surabaya ; Putra Media Nusantara.

Chazawi Adami, dan Ferdian Ardi, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang ; Bayumedia Publishing.

- Djubaedah Neng, 2009, *Pornografi dan Porno Aksi Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*, Jakarta ; Kencana.
- Frank E., Hagan. 1989. *Introducing Criminology Theories, Method and Criminal Behavior*, Chicago ; Nelson-Hall Inc.
- Hamzah Andi, 1989, *Aspek-aspek Pidana Dalam Kejahatan Komputer*, Jakarta ; Sinar Grafika.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1991, *Penanggulangan Kejahatan Komputer*, Jakarta ; Lokakarya.
- Mahmud Peter, 2010, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-6*, Jakarta ; Kencana.
- Mansur Arief dan Gultom Elisatris, 2005, *Cyber Law ; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung ; Rafika Aditama.
- Mansur Arief, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta ; Liberty.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta ; Rieneka Citra.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.
- Muladi dan Dwija Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, ; Kencana Prenada Media Group.
- Sahetapy, J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta ; Liberty.
- Soekanto Soerdjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Soekanto Soerdjono, dan Mamudi Sri, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta ; RajaGrafindo Persada.
- Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta ; Rajagrafindo.
- Suheimi, 1991, *Kejahatan Komputer*, Yogyakarta ; Andi Offset.
- Suparni Niniek.2009, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Syahdeini Sutan Remy, 2011, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta ; Grafiti.

Wahid Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung ; Refika Aditama.

Wahid Abdul dan Labib Mohammad, 2009, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jakarta ; Refika Aditama.

Wiyanto Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung ; Mandar Maju

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Indonesia

UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

INTERNET

Afriadi, teguh. 2008, *Menjerat Pelaku Cybercrime Dengan KUHP (online)*, www.depkominfo.co.id

Arwan, *Asas-asas Hukum Pidana (online)*, www.arwanblack74.blogspot.com

Dewa Gilang, *Sepak Terjang Sang Ratu Germa (online)*, <http://hukum.kompasiana.com>

Heru Sutadi, *Cyber Media (online)*, 30, www.kompasiana.com

Interpol Indonesia, *Cybercrime : Sebuah Fenomena Di Dunia Maya (online)*, www.interpol.go.id diakses 19 Oktober 2012

Polrestabalerangbatam, *Perkembangan Kejahatan Komputer (online)*, www.polrestabarelangbatam.com

UNICEF, Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil dan Perdagangan Anak (online), www.unicef.org,